

INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA

Provinsi Aceh

2016



INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA

Provinsi Aceh

2016



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH 2016

ISSN : 2477.4650
Nomor Publikasi : 11550.1708
Katalog BPS : 4102002.11
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xiii + 61 halaman

Naskah

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyelaras Akhir

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh

©Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Pengarah **Drs. WAHYUDIN, M.M.** Editor **Ir. ANDARIATI AFRIDA** Penulis **Dr. AZWAR – RIZKI HADIMAN, SST**
Pengolah Data dan Peta **Dr. AZWAR – RIZKI HADIMAN, SST** Perancang Sampul **MUHAMMAD REZA**

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai salah satu tolak ukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indeks ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Indikator- indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian angka IPM dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Sehingga diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk dan pembangunan manusianya.

Angka IPM Aceh dari tahun 2010 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih memerlukan perhatian yang serius dikarenakan masih tingginya disparitas pencapaian pembangunan antarkabupaten/kota.

Publikasi IPM Provinsi Aceh Tahun 2016 ini berisikan angka capaian IPM Aceh sejak tahun 2010 sampai dengan 2016. Penyajian data dan analisis yang tercakup di dalamnya bertujuan memberi gambaran kondisi pembangunan manusia Aceh sampai ke lingkup kabupaten/kotanya.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Banda Aceh, 14 Agustus 2017

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh**



Drs. Wahyudin, M.M.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>



DAFTAR SINGKATAN

ABH	Angka Buta Huruf
AHH	Angka Harapan Hidup
AHS	Angka Harapan Sekolah
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	Association of South East Asian Nations
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
GNP	Gross National Product
HDI	Human Development Index
HDR	Human Development Report
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
MDG's	Millennium Development Goals
MYS	Mean Years of Schooling
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PJP	Pembangunan Jangka Panjang
Podes	Potensi Desa
PPP	Purchasing Power Parity
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UNDP	United Nations Development Programme
UUD	Undang-Undang Dasar

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH.....	5
2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Provinsi Aceh	7
2.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota	12
BAB 3 PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA.....	21
3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan	23
3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan	25
3.3 Capaian dan Tantangan di Bidang Ekonomi	30
BAB 4 DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH	33
4.1 Disparitas IPM Antarkabupaten di Provinsi Aceh	35
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
2.1	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2010-2016	13
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status Pencapaian IPM, 2010-2016	16
2.3	IPM dan PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	17
2.4	Lima Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2010-2016	18
2.5	Lima Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2010-2016.....	19
3.1	Disparitas Angka Partisipasi Sekolah Antarkabupaten, 2010-2016	24

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://acer.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
2.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh, 2010-2016	7
2.2	Pertumbuhan IPM Provinsi Aceh, 2010-2016	8
2.3	Angka Harapan Hidup Provinsi Aceh, 2010-2016	9
2.4	Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2016.....	10
2.5	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2016	11
2.6	Pengeluaran Perkapita Per Tahun Provinsi Aceh, 2010-2016	12
2.7	Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota, 2010-2016.....	15
3.1	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh, 2013-2016.....	23
3.2	Angka Kesakitan Provinsi Aceh, 2010-2016	26
3.3	Persentase Penduduk Aceh Menurut Tempat/Cara Berobat Jalan, 2016	27
3.4	Beberapa Indikator Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, 2015-2016	28
3.5	Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis di Provinsi Aceh, 2010-2016.....	29
3.6	Tren Kemiskinan Provinsi Aceh, 2005-2016	30
3.7	Tren Gini Rasio Provinsi Aceh, 2006-2016.....	31
3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh, 2005-2016.....	32
4.1	Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016	35
4.2	Disparitas Angka Harapan Hidup Antar Kabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016...	36
4.3	Disparitas Harapan Lama Sekolah Antar Kabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016 .	37
4.4	Disparitas Rata-Rata Lama Sekolah Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016	38
4.5	Disparitas Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016.....	39
4.6	Disparitas Pertumbuhan IPM Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016	40

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.dps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Hal
1	Angka Harapan Hidup Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016	45
2	Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016.....	46
3	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2004-2012	47
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016.....	48
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016.....	49



PENDAHULUAN

Organisasi internasional yang menangani perihal pembangunan manusia di PBB yaitu *UNDP (United Nation Development Programme)* mendeklarasikan bahwa pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang memposisikan manusia bukan sebagai alat pembangunan, tapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

PENDAHULUAN

Ide dasar pembangunan manusia adalah untuk memenuhi tujuan utama pemerintah Indonesia dalam mencapai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Perwujudan gagasan pembangunan manusia adalah dengan memfokuskan perhatian pembangunan nasional Indonesia pada manusia sebagai titik sentral yang bercorak dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tidak dapat dipungkiri, rakyat harus diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan. Artinya, rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk memenuhi hal tersebut, yaitu untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, tentunya dibutuhkan masyarakat Indonesia yang unggul dari segi kuantitas, serta maju dari segi kualitas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah tersebut merupakan prasyarat penting untuk mencapai masyarakat Indonesia yang berkualitas.

Di era sebelumnya, yakni sebelum 1970-an, tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun per kapita menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Kenyataannya, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai oleh negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), namun taraf hidup penduduknya tidak ikut meningkat. Oleh karena itu, para pakar merumuskan konsep baru dalam mengukur pembangunan suatu negara yang berorientasi pada manusia. Konsep ini mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pula kualitas manusianya. Inilah tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, diperlukan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas manusia sebagai bangsa Indonesia yang bersaing di era globalisasi. Regulasi pembangunan yang memegang teguh prinsip dan konsep pembangunan manusia mutlak diperlukan dimana manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir pembangunan. Cara pandang yang lebih luas ini memungkinkan pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga negara serta dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap dalam jangka panjang.

Pendahuluan

Sejak tahun 1990, angka IPM telah menjadi salah satu indikator yang mencerminkan progres kemajuan suatu bangsa. Seperti yang dinyatakan dalam laporan yang dirilis oleh UNDP. Dalam laporan tersebut, tercakup 187 negara yang sudah terukur capaian IPM beserta semua komponen pembentuknya. Secara internasional, terdapat pembagian kelompok negara-negara berdasarkan nilai IPM nya, yaitu sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah.

Perspektif baru yang dibangun oleh dunia internasional adalah kaitan pembangunan manusia dengan aspek kerentanan. Masyarakat dengan pembangunan manusia yang lebih tinggi terutama dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik lebih tahan banting dibandingkan dengan mereka yang kekurangan gizi dan rendah pendidikannya. Sehingga masyarakat yang rentan ini akan menghadapi kesulitan dalam mengubah nasibnya ketika terjadi guncangan maupun bencana. Pendekatan berbasis resiko akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan dalam hal pengelolaan resiko. Sama pentingnya dengan pendekatan pembangunan manusia yang membentuk kekuatan individu maupun masyarakat dalam upaya mengurangi kerentanan dan membangun ketahanan secara sosial maupun ekonomi.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Untuk itu, dalam rangka melihat kemajuan pembangunan, publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan komponen IPM pada tahun 2010-2016. Data IPM secara lengkap pada tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel lampiran. Pada publikasi ini akan dianalisis mengenai capaian IPM Provinsi Aceh dan disparitasnya pada level kabupaten/kota.

Secara khusus, publikasi ini menyajikan:

- 1) Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Aceh;
- 2) Analisis peningkatan kapabilitas dasar pembangunan manusia di Provinsi Aceh;
- 3) Analisis disparitas capaian IPM dan komponennya level kabupaten/kota;
- 4) Analisis disparitas IPM antar-kabupaten/kota.



PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH

Capaian pembangunan manusia Aceh semakin membaik dari tahun ke tahun. Terlihat dari IPM dan komponennya yang kian meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Demikian pula dengan pembangunan manusia kabupaten/kota di Aceh. Selama periode waktu 2010-2016 banyak terjadi pergeseran peringkat IPM pada level kabupaten/kota

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH

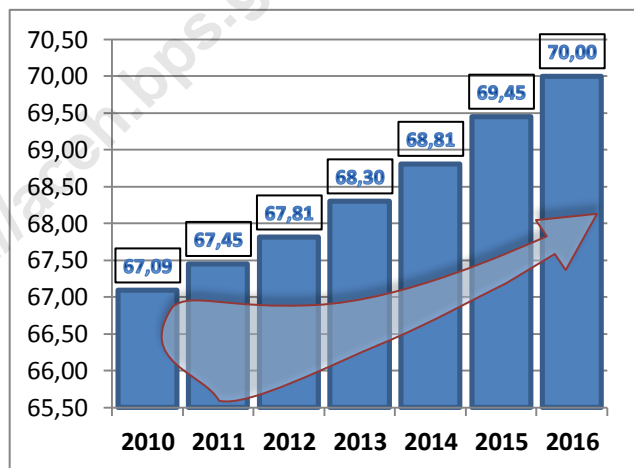
2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Provinsi Aceh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2010 hingga 2016 (lihat Gambar 2.1). IPM Aceh telah mengalami kenaikan sebesar 2,91 poin dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Aceh yang dilihat semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Gambar 2.1

Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

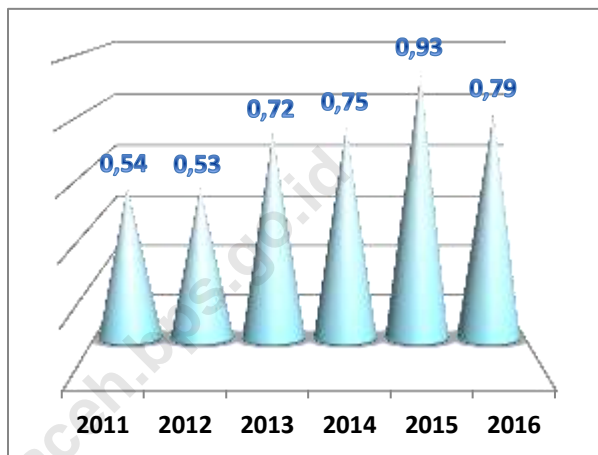
Seperti telah dipaparkan bahwa IPM metode baru mengalami penurunan level dibandingkan dengan angka IPM dengan metode sebelumnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan status IPM Provinsi Aceh dari status pembangunan tinggi (indeks ≥ 70) menjadi status pembangunan sedang (indeks 60-70).

Pembagian kategori IPM untuk membedakan capaian antarwilayah dikelompokkan menjadi: kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80), kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), dan kategori rendah (IPM < 60). Dengan metode penghitungan IPM yang baru, sejak tahun 2010, IPM Aceh berada pada kategori sedang.

Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai indikasi yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Ini adalah indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode waktu. Pertumbuhan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM pada satu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Dalam rangka mencapai nilai ideal IPM yaitu 100, tentunya dibutuhkan pertumbuhan IPM yang tinggi. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka semakin cepat nilai IPM yang ideal akan tercapai.

Gambar 2.2

Pertumbuhan IPM Provinsi Aceh,
2011-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.2 menampilkan pertumbuhan IPM Aceh tiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2011 – 2016, pertumbuhan IPM memperlihatkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Tahun 2011, IPM Aceh tumbuh 0,53 persen dibandingkan IPM tahun 2010. Angka yang sama ditunjukkan kembali pada pertumbuhan IPM 2012 terhadap capaian IPM Aceh tahun 2011, yaitu 0,53 persen. Kondisi terkini, IPM Aceh tahun 2016 berhasil naik sebesar 0,79 persen dibandingkan dengan angka IPM tahun 2015. Secara umum, rata-rata pertumbuhan IPM Aceh tiap tahun dari 2011 – 2016 adalah sebesar 0,71 persen.

Dalam metode baru IPM, tiga komponen utama dalam pengukuran capaian pembangunan manusia, sesuai dengan rekomendasi UNDP, adalah dimensi umur dan kesehatan (Angka Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita). Dengan menggunakan rata-rata geometrik, ketiga dimensi membentuk IPM dengan keseimbangan peningkatan di masing-masing dimensi.

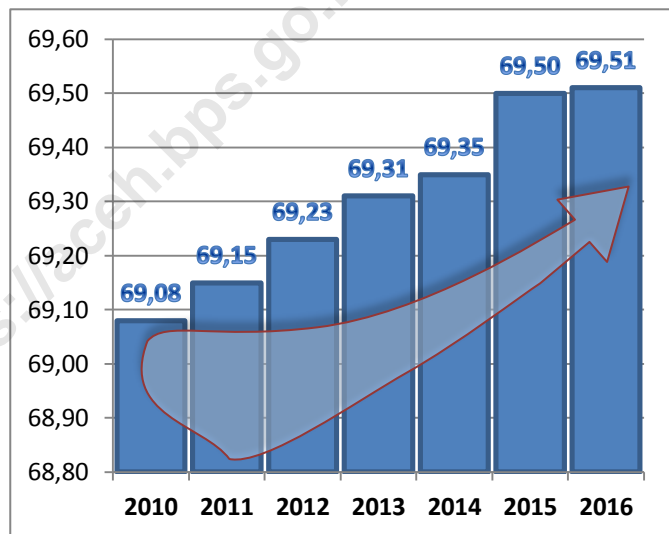
Dimensi yang pertama, Angka Harapan Hidup (AHH) adalah indikator yang menggambarkan aspek kesehatan. Yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator

AHH maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah tertentu untuk hidup lebih lama.

Di Provinsi Aceh, indikator ini menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2010 – 2016. AHH Aceh tahun 2010 sebesar 69,08 tahun, artinya bayi yang lahir di Aceh pada tahun 2010 akan bertahan hidup hingga usia 69 tahun 1 bulan. Dengan terjadinya kenaikan AHH tiap tahun, pada tahun 2016 AHH Aceh telah mencapai 69,51 tahun, atau bayi yang lahir di Aceh tahun 2016 berpeluang hidup hingga usia 69 tahun 6 bulan. Hal ini menandakan bahwa adanya kondisi yang semakin membaik dalam hal derajat kesehatan masyarakat di Aceh karena AHH merupakan salah satu indikasi tinggi kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup masyarakat di Provinsi Aceh memang menunjukkan peningkatan, namun capaian tersebut masih di bawah angka nasional yang pada tahun 2016 mencapai 70,90 tahun.

Gambar 2.3

Angka Harapan Hidup
Provinsi Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam hal kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, memiliki sumber daya manusia yang sehat adalah investasi yang vital. Perwujudan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan sampai ke tingkat terkecil dan daerah terpencil dicapai dengan adanya jaminan kecukupan jumlah tenaga kesehatan berbanding dengan jumlah penduduk yang perlu penanganan kesehatan. Pemerintah wajib proaktif menyerukan budaya dan kebiasaan hidup sehat agar peningkatan kualitas manusia dari dimensi ini tidak hanya sekedar angka dalam indikator, namun terwujudkan secara riil di kehidupan masyarakat Aceh.

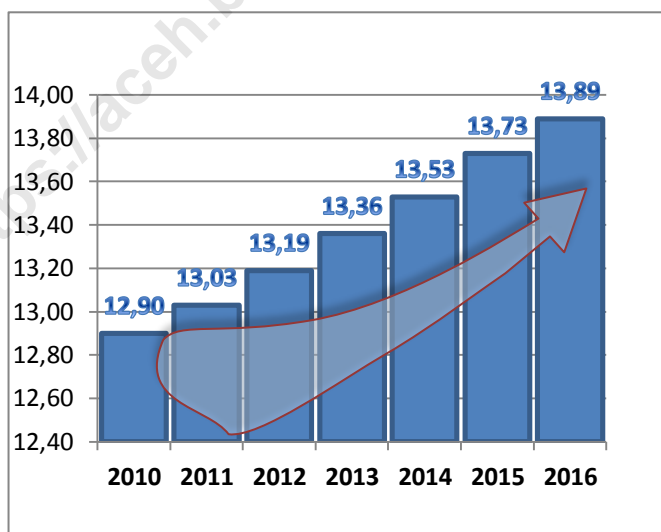
Dimensi kedua yang menjadi pembentuk indeks pembangunan manusia adalah aspek pendidikan. Pada penghitungan IPM metode baru, aspek ini dibentuk oleh agregat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Disebutkan sebelumnya, penghitungan yang baru ini untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang tidak lagi sesuai lagi digunakan pada masa sekarang. Harapan lama sekolah dihitung dari jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang bersekolah sampai dengan jenjang tertentu menurut kelompok umur yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun. Indikator ini, kenyataannya, tidak mencakup anak yang mulai sekolah pada usia 5 tahun, juga tidak meliputi siswa yang bersekolah di pesantren.

Angka harapan lama sekolah Aceh pada tahun 2010 adalah 12,90 tahun. Maknanya adalah, seorang yang berusia 7 tahun pada tahun 2010 mempunyai peluang untuk bersekolah selama 12,90 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun pertama (dengan asumsi lama sekolah 12 tahun telah menamatkan sekolah menengah atas). Capaian HLS Aceh hingga tahun 2016 terus meningkat dan mencapai angka 13,89 tahun. Ketika angka ini terpenuhi, maka harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas di Provinsi Aceh pada tahun 2016 berada pada tahun kedua di jenjang perguruan tinggi. Faktanya, HLS Aceh tahun 2016 lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional untuk indikator harapan lama (HLS nasional tahun 2016 sebesar 12,72 tahun).

Gambar 2.4

Harapan Lama Sekolah
Provinsi Aceh, 2010-2016



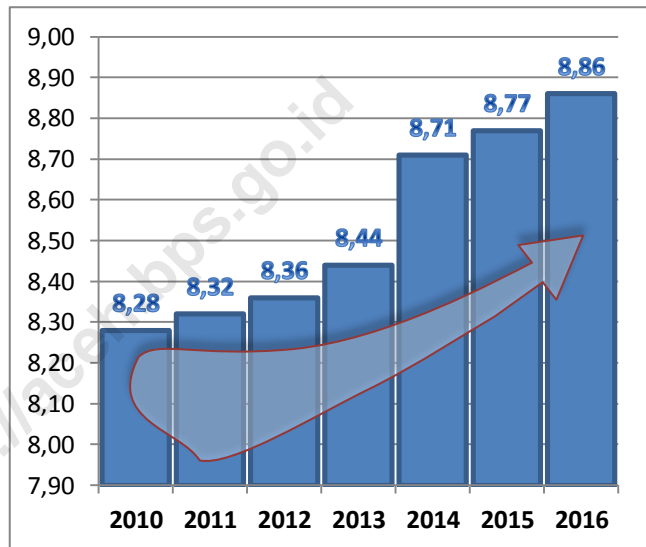
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain HLS, komponen pendidikan lainnya yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (dengan asumsi pada saat berusia 25 tahun proses pendidikan seseorang sudah berakhir). Indikator ini merupakan penghitungan dari kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki, ijazah tertinggi yang pernah dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki.

Sama seperti HLS, angka RLS dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti ditampilkan pada Gambar 2.5, pada tahun 2010 penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata bersekolah sampai dengan kelas 3 SMP (belum tamat) atau telah mengenyam pendidikan selama 8,28 tahun. Angka ini terus meningkat hingga ke tahun 2016 yang mencapai 8,86. Namun walaupun meningkat, hingga tahun 2016, secara rata-rata penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata bersekolahnya masih sampai dengan kelas 3 SMP, atau telah mengenyam pendidikan selama 8,86 tahun, belum sampai menginjak jenjang pendidikan SMA.

Gambar 2.5

Rata rata Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

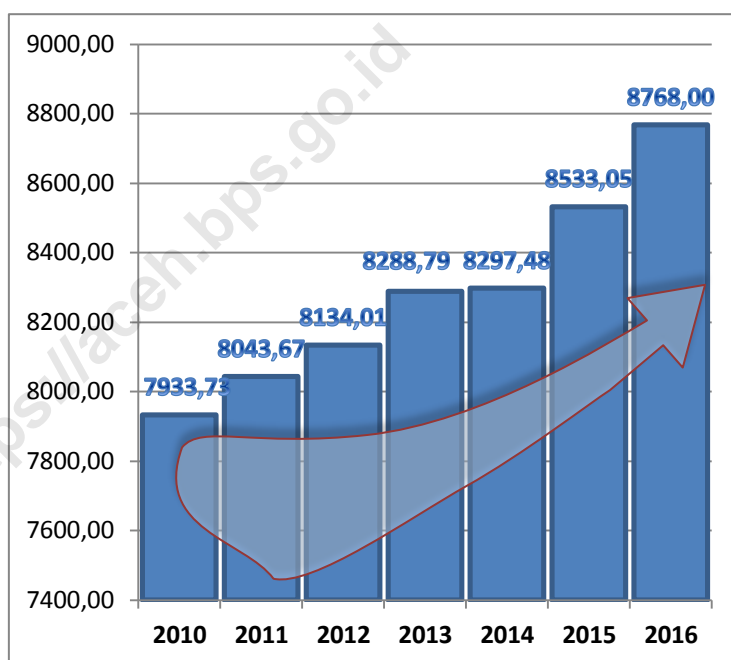
Dibandingkan dengan angka RLS nasional, capaian Provinsi Aceh pada komponen IPM tahun 2016 lebih tinggi dari rata-rata 33 provinsi. RLS nasional tahun 2016 tercatat sebesar 7,95 tahun, artinya masih belum memenuhi atau kurang dari 9 tahun sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam program wajib belajar. Sedangkan di Aceh, meskipun RLS sudah hampir mencapai angka 9 tahun, namun sarana pendukung dunia pendidikan seperti jumlah sekolah maupun tenaga pendidik secara kuantitas maupun kualitas masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Aspek terakhir yang membentuk IPM adalah salah satu indikator yang menggambarkan kualitas hidup manusia dari standar hidup layak. Indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Purchasing Power Parity – PPP) menunjukkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk konsumsi barang maupun jasa. Perubahan kondisi perekonomian akan secara nyata ikut merubah pola konsumsi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen ini cukup sensitif.

Indikator PPP dalam IPM metode baru mencakup 96 komoditas, terdiri dari 60 komoditas makanan dan 36 komoditas nonmakanan. Cakupan ini lebih luas dari sebelumnya pada penghitungan cara lama yang hanya mencakup total 27 komoditas dalam menghitung paritas daya beli konsumen. Sumber data utama dari komponen ini adalah hasil pencacahan Susenas yang menghasilkan rata-rata pengeluaran per kapita selama setahun, mulai dari level provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Selama periode tahun 2010-2016, pengeluaran per kapita penduduk Aceh setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2010, pengeluaran per kapita Aceh terhitung sebesar 7.933,7 juta rupiah, sementara tahun 2016 meningkat menjadi 8.768 juta rupiah. Gambar 2.6 menampilkan perubahan komponen pengeluaran per kapita per tahun masyarakat Aceh selama tahun 2010-2016.

Gambar 2.6

Pengeluaran Perkapita Per Tahun Provinsi Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota

Dua puluh tiga kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Aceh memiliki keberagaman baik dari segi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan capaian pembangunan manusia berbeda pada setiap daerah. Faktor-faktor penentu keberhasilan capaian pembangunan ditentukan dari program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Disamping upaya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia.

Secara umum, kualitas manusia di masing-masing kabupaten/kota di Aceh yang diukur melalui IPM terlihat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan agregat IPM Aceh. Daerah-daerah dengan IPM yang relatif tinggi mampu mempertahankan prestasinya (meskipun ada yang naik-turun peringkatnya), sementara daerah yang masih lebih rendah semakin terpacu untuk meningkatkan kapabilitas manusia di masing-masing komponen pembentuknya.

Tabel 2.1 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2010-2016

Propinsi/ Kabupaten/Kota	IPM						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00
01. Simeulue	60,60	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82
02. Aceh Singkil	62,36	63,13	64,23	64,87	65,27	66,05	66,96
03. Aceh Selatan	61,22	61,52	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13
04. Aceh Tenggara	63,82	64,27	64,99	65,55	65,90	66,77	67,48
05. Aceh Timur	61,75	62,35	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42
06. Aceh Tengah	69,17	70,00	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04
07. Aceh Barat	66,05	66,47	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26
08. Aceh Besar	69,76	69,94	70,10	70,61	71,06	71,70	71,75
09. Pidie	66,75	66,95	67,30	67,59	67,87	68,68	69,06
10. Bireuen	66,42	67,03	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21
11. Aceh Utara	63,56	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19
12. Aceh Barat Daya	60,91	61,75	62,15	62,62	63,08	63,77	64,57
13. Gayo Lues	60,93	61,91	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26
14. Aceh Tamiang	64,67	64,89	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41
15. Nagan Raya	63,57	64,24	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32
16. Aceh Jaya	64,75	65,17	66,42	66,92	67,30	67,53	67,70
17. Bener Meriah	67,29	68,24	69,14	69,74	70,00	70,62	71,42
18. Pidie Jaya	68,38	68,69	68,90	69,26	69,89	70,49	71,13
71. Banda Aceh	80,36	80,87	81,30	81,84	82,22	83,25	83,73
72. Sabang	69,70	70,15	70,84	71,07	71,50	72,51	73,36
73. Langsa	71,79	72,15	72,75	73,40	73,81	74,74	75,41
74. Lhokseumawe	71,55	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78
75. Subulussalam	58,97	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi, selama periode tahun 2010-2016 selalu menempati posisi pertama dalam peringkat IPM se-Provinsi Aceh. Hal ini tentu saja dikarenakan ketersediaan berbagai fasilitas dan sarana kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang lebih memadai di Kota Banda Aceh. Potensi inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Kota Banda Aceh. Hasil penghitungan metode baru, IPM Banda Aceh telah masuk dalam kategori IPM sangat tinggi ($IPM \geq 80$) sejak tahun 2010 hingga tahun 2016. Presni bahkan menjadikan Kota Banda Aceh masuk dalam jajaran daerah dengan IPM tertinggi se-Indonesia. Jika dilihat lebih rinci, komponen IPM Kota Banda Aceh pada tahun 2016 sehingga mampu mencapai peringkat tertinggi se-Aceh adalah Angka Harapan Hidup yang tinggi (70,92 tahun), harapan lama sekolah mencapai 17,03 tahun, rata-rata mencicipi pendidikan melalui bangku sekolah selama 12,57 tahun (semester 1 pada jenjang pendidikan perguruan tinggi) dan pengeluaran per kapita per tahun penduduknya mencapai 15,737 juta rupiah.

Di bawah peringkat Kota Banda Aceh adalah Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa. Dua daerah ini sejak tahun 2011-2016 bertahan menduduki peringkat 2 dan 3 dalam capaian IPM. Bahkan pada tahun 2010 yang menduduki peringkat IPM tertinggi kedua adalah Kota Langsa. Unsur-unsur penunjang dalam berbagai aktivitas sosial ekonomi yang telah dibangun di kedua kota ini seperti bangunan sekolah, rumah sakit dan sektor penunjang perekonomian masyarakat seperti perdagangan dan jasa-jasa lainnya telah berkembang dengan baik. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya yang termasuk ke dalam peringkat 10 besar IPM pada tahun 2016 adalah: Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Barat.

Di peringkat menengah ke bawah, yaitu dari 11 sampai dengan 15, pada tahun 2016 ditempati oleh Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Nagan Raya. Di kelima daerah tersebut, pembangunan manusianya tercermin dari Angka Harapan Hidup yang berkisar antara 66,52 tahun hingga 69,08 tahun. Dari segi pendidikan, kelima daerah dengan IPM menengah ini tercatat harapan lama sekolahnya sekitar 13,55 hingga 14,09 tahun dan rata-rata lama bersekolahnya sekitar sekitar 7,95 sampai 9,33 tahun (kelas 2 SMP – kelas 1 SMA). Sementara besaran pengeluaran per kapita per tahun di kelima kabupaten ini adalah sekitar 7,212 – 9,273 juta rupiah.

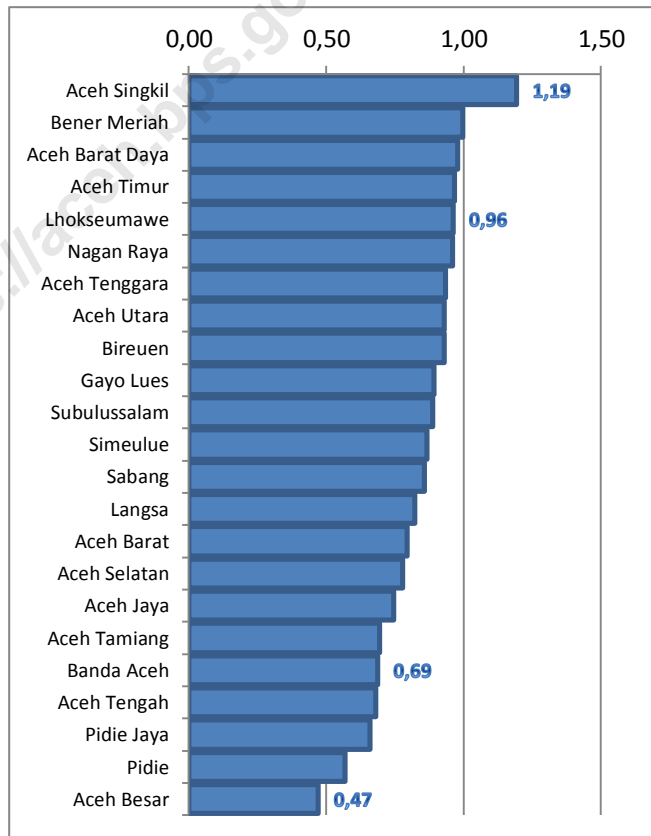
Daerah-daerah yang capaian pembangunan manusianya paling rendah adalah Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Simeulue, dan Kota Subulussalam. Kelima daerah ini menempati peringkat 19 hingga 23 secara bergantian selama tahun 2010 – 2016. Pada tahun 2016, capaian AHH penduduk di wilayah tersebut hanya berkisar antara 63,75 – 69,08 tahun, HLS penduduk usia di atas 7 tahun hanya selama 13,27 –

14,09 tahun, dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas selama 7,10 – 8,24 tahun (kelas 2 sampai kelas 3 SMP), dan PPP disesuaikan juga sangat rendah yaitu hanya sebesar 7,397 – 8,048 juta rupiah.

Perubahan peringkat IPM yang terjadi bergantung pada pembangunan unsur-unsur penunjang IPM di masing-masing kabupaten/kota, yang tentu saja memiliki berbagai tingkat perubahan pembangunan yang berbeda-beda. Pemekaran wilayah beberapa kabupaten/kota selama periode 2010-2016 juga menjadi salah satu faktor perbedaan kemajuan pembangunan antara kabupaten baru dengan kabupaten induknya. Secara umum, pembangunan fasilitas yang biasanya lebih dahulu terjadi di perkotaan, sehingga pelayanan di pelosok kabupaten menjadi lebih kurang. Beberapa kabupaten berhasil mempertahankan peringkatnya secara berkesinambungan. Hal ini dapat dikarenakan beberapa kabupaten induk tetap mempertahankan beberapa fasilitas yang dimiliki, seperti gedung perkantoran, sekolah, dan sarana kesehatan.

Gambar 2.7

Rata-Rata Pertumbuhan IPM
Kabupaten/Kota, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Ditinjau dari perkembangan capaian IPM yang menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah yaitu berdasarkan kecepatan pergerakan IPM menuju nilai ideal yang ditampilkan melalui pertumbuhan IPM dari tahun ke tahun. Seperti terlihat pada gambar 2.7, selama periode tahun 2010 – 2016 pertumbuhan IPM

kabupaten/kota se-Provinsi Aceh menunjukkan bahwa kecepatan peningkatan IPM per tahun berkisar antara 0,47 sampai dengan 1,19. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang relatif tidak begitu berbeda. Kabupaten Aceh Singkil selama rentang waktu tersebut berhasil mencatatkan rata-rata pertumbuhan IPM paling tinggi yaitu 1,19 dan Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang paling rendah yaitu 0,47.

Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status Pencapaian IPM, 2010, 2014, 2016

Kategori	2010	2014	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Sangat Tinggi (IPM \geq 80)	1	1	1
Tinggi ($70 \leq$ IPM $<$ 80)	2	6	8
Sedang ($60 \leq$ IPM $<$ 70)	19	16	14
Rendah (IPM $<$ 60)	1	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain melihat dari pertumbuhan IPM, kemajuan pencapaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dengan menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah meningkat status pencapaian IPM-nya dari kategori rendah ke kategori yang lebih tinggi pada periode tertentu. Pada tahun 2010, masih terdapat satu kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori IPM rendah (di bawah indeks 60), yaitu Kota Subulussalam, yang pada saat itu hanya mencapai IPM sebesar 58,97. Pada tahun 2014 dan 2016, tidak ada lagi daerah di Aceh yang berstatus rendah. Kota Banda Aceh menjadi satu-satunya daerah yang status IPM-nya sangat tinggi di Provinsi Aceh, sementara 8 kabupaten/kota lainnya berstatus IPM tinggi (indeks antara 70-79) dan 15 daerah lainnya masih berstatus IPM sedang (indeks antara 60-69).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercermin dari hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak secara langsung berkaitan dengan pembangunan manusia. Potensi-potensi ekonomi yang tercakup dalam sektor-sektor pembentuk PDRB di suatu kabupaten/kota nyatanya tidak selamanya seiring sejalan dengan pembangunan manusia di daerah tersebut. Namun demikian, beberapa kabupaten/kota masih menunjukkan korelasi antara peringkat PDRB dengan capaian IPM-nya. Hal ini ditunjukkan dengan selisih antara kedua peringkat tidak terlalu jauh atau bahkan sama.

Tabel 2.3 memperlihatkan potensi ekonomi suatu wilayah yang diukur dengan PDRB per kapita dan perbandingannya dengan capaian IPM-nya. Secara umum menegaskan perbedaan antara seberapa tingginya capaian PDRB dengan seberapa tinggi IPM di wilayah tertentu di Aceh. Namun begitu, beberapa daerah masih

menunjukkan kesamaan antara peringkat PDRB dengan IPM-nya, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe. Sementara itu, perbedaan mencolok terlihat pada Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Gayo Lues dengan peringkat PDRB per kapita yang jauh selisihnya dengan peringkat IPM-nya.

Fenomena-fenomena di atas pada hakikatnya dapat melemahkan berbagai opini yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan pertumbuhan pembangunan manusia. Pemahaman yang keliru tentang konsep pembangunan manusia akan memunculkan anggapan yang keliru pula bahwa PDRB gagal menjadi indikator kemajuan ekonomi.

Tabel 2.3 IPM dan PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	IPM	PDRB (juta)	Rangking IPM	Rangking PDRB	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Simeulue	70,00	18,722	22	19	3
02. Aceh Singkil	63,82	15,811	17	23	-6
03. Aceh Selatan	66,96	18,924	21	18	3
04. Aceh Tenggara	64,13	17,900	13	20	-7
05. Aceh Timur	67,48	20,421	18	16	2
06. Aceh Tengah	65,42	30,019	5	6	-1
07. Aceh Barat	72,04	30,079	10	5	5
08. Aceh Besar	69,26	26,324	6	8	-2
09. Pidie	71,75	19,074	11	17	-6
10. Bireuen	69,06	23,066	9	13	-4
11. Aceh Utara	70,21	28,060	16	7	9
12. Aceh Barat Daya	67,19	21,105	19	14	5
13. Gayo Lues	64,57	23,687	20	10	10
14. Aceh Tamiang	64,26	20,661	14	15	-1
15. Nagan Raya	67,41	37,416	15	3	12
16. Aceh Jaya	67,32	23,186	12	12	0
17. Bener Meriah	67,70	26,092	7	9	-2
18. Pidie Jaya	71,42	17,566	8	21	-13
71. Banda Aceh	71,13	58,896	1	1	0
72. Sabang	83,73	31,818	4	4	0
73. Langsa	73,36	23,579	3	11	-8
74. Lhokseumawe	75,41	41,493	2	2	0
75. Subulussalam	75,78	17,178	23	22	1

Sumber: Badan Pusat Statistik

Letak kewilayahan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Bagian Utara dan Timur, Bagian Barat dan Selatan, serta Bagian Tengah dan Tenggara. Letak geografis ini secara tidak langsung juga tercermin dalam pengelompokkan capaian peringkat IPM tertinggi dan terendah. Untuk kabupaten/kota yang terletak di wilayah bagian utara dan timur, sebanyak lima kabupaten/kota menempati urutan peringkat lima teratas IPM selama periode 2010-2016, sementara dari wilayah tengah-tenggara hanya satu kabupaten yang berhasil mencapai posisi ini. Enam kabupaten/kota yang selama periode 2010-2016 berbagi tempat di peringkat teratas dalam hal capaian pembangunan manusianya adalah Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.4 Lima Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2010-2016

Kab/Kota	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Banda Aceh	80,36	80,87	81,30	81,84	81,84	83,25	83,73
Langsa	71,79	72,15 (3)	72,75 (3)	73,40 (3)	73,40 (3)	74,74 (3)	75,41 (3)
Lhokseumawe	71,55	72,35 (2)	73,55 (2)	74,13 (2)	74,13 (2)	75,11 (2)	75,78 (2)
Aceh Besar	69,76	69,94 (6)	70,10 (6)	70,61 (5)	70,61 (5)	71,70 (5)	71,75 (6)
Sabang	69,70	70,15 (4)	70,84 (4)	71,07 (4)	71,07 (4)	72,51 (4)	73,36 (4)
Aceh Tengah	69,70	70,00 (5)	70,18 (5)	70,51 (6)	70,51 (6)	71,51 (6)	72,04 (5)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Seperti telah disebutkan, Kota Banda Aceh menempati peringkat pertama capaian IPM selama tahun 2010 – 2016. Sementara itu, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe saling bertukar posisi pada tahun 2011, kemudian mempertahankan posisi 2 dan 3 sampai dengan tahun 2016. Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Tengah selama periode tahun 2010-2011, 2012-2013, serta 2015-2016 masih berubah-ubah peringkat IPM nya di antara peringkat empat hingga peringkat enam.

Tabel 2.5 Lima Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2010-2016

Kab/Kota	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh Timur	61,75	62,35	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42
Aceh Selatan	61,22	61,52 (21)	61,69 (21)	62,27 (21)	62,35 (21)	63,28 (21)	64,13 (21)
Gayo Lues	60,93	61,91 (19)	62,85 (19)	63,22 (19)	63,34 (19)	63,67 (20)	64,26 (20)
Aceh Barat Daya	60,91	61,75 (20)	62,15 (20)	62,62 (20)	63,08 (20)	63,77 (19)	64,57 (19)
Simeulue	60,60	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82
Subulussalam	58,97	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18

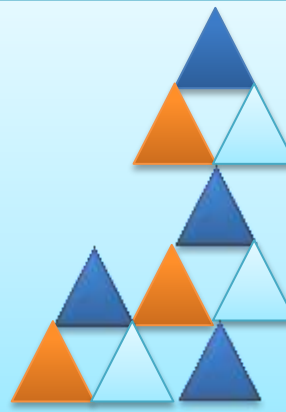
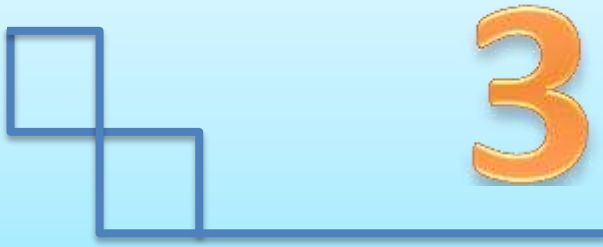
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada kelompok peringkat IPM terendah, enam kabupaten yang menempati posisi ini sejak tahun 2010 hingga tahun 2016. Kabupaten Aceh Timur secara konsisten menempati urutan IPM ke-18 selama periode tersebut. Sementara Kabupaten Aceh Selatan, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya berada pada urutan masing-masing ke-19, ke-20, dan ke-21 pada tahun 2010, kemudian mengalami perubahan naik turunnya peringkat IPM pada ketiga daerah ini hingga tahun 2016. Kota Subulussalam yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil adalah yang paling rendah nilai IPM-nya dan menempati posisi paling bawah peringkat IPM se-Provinsi Aceh sejak tahun 2010-2016. Kesimpulannya adalah empat kabupaten/kota yang menempati posisi terbawah yang ditampilkan pada Tabel 2.5 merupakan daerah hasil pemekaran wilayah, sehingga pembangunan belum terdongkrak dengan program-program pembangunan dari pemerintah setempat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa, selama periode tahun 2010-2016, pencapaian pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih relatif bervariasi terlihat dari persebarannya dalam pengelompokan status IPM. Upaya pemerintah daerah tingkat II (pemerintah kabupaten/kota) dan pemerintah tingkat I (pemerintah provinsi) dalam meningkatkan pembangunan manusia di wilayahnya masing-masing masih harus ditingkatkan meskipun telah menampakkan hasil yang baik. Capaian yang baik adalah tidak ada lagi kabupaten/kota yang berstatus IPM rendah sejak tahun 2014 dan capaian terbaiknya adalah sudah ada 1 daerah yang sejak tahun 2010-2016 mewakili Aceh untuk masuk ke IPM berstatus sangat tinggi, yaitu Kota Banda Aceh.

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA

Peningkatan pembangunan manusia tidak hanya difokuskan pada komponen penyusun IPM, tetapi juga pada indikator-indikator lain yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi peningkatan komponen IPM. Perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh karena dua aspek tersebut sebagai modal dasar dalam membentuk manusia yang berkualitas

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA

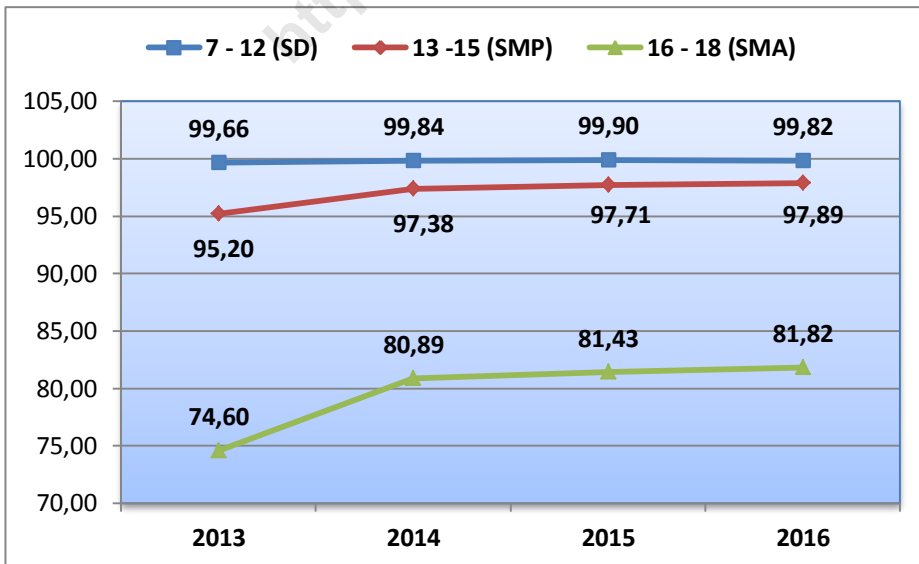
Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Cakupan pendidikan formal idealnya mengalami perluasan, sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan. Dalam rangka ini, pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh. Diantaranya yaitu program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS serta menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Gambar 3.1

Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh, 2013-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Secara umum APS Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari periode 2013 sampai dengan 2016. Gambar 3.1 menunjukkan capaian APS pada setiap kelompok umur sekolah dimana capaian APS 7-12 tahun atau usia sekolah dasar merupakan APS yang tertinggi.

Sejak tahun 2013 sampai 2016, APS untuk kelompok 7-12 tahun berturut-turut mencapai 99,66 persen, 99,84 persen, 99,90 persen, dan 99,82 persen. Namun demikian, hal ini perlu dicermati bahwa belum semua penduduk di Aceh mengecap pendidikan formal sampai lulus sekolah dasar.

Lebih lanjut, APS 13-15 tahun atau usia sekolah menengah pertama, selama periode 2013-2016 mengalami peningkatan, walaupun capaiannya lebih rendah dari APS 7-12 tahun. Tercatat hanya 97,89 persen penduduk di Aceh yang berpartisipasi dalam sekolah untuk kelompok umur ini, meningkat dari 97,71 persen pada tahun 2015. Capaian ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, bahwa masih terdapat sekitar 3 persen penduduknya yang belum mengecap pendidikan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk usia sekolah 16-18 tahun, tingkat APS tahun 2016 hanya mencapai 81,82 persen. Hal ini berarti masih terdapat sekitar 19 persen penduduk Aceh tidak menamatkan pendidikan sekolah menengah atas.

Tabel 3.1 Disparitas Angka Partisipasi Sekolah Antarkabupaten, 2014-2016

Kelompok Umur	Tahun	Maksimum	Minimum	5 Kab/Kota dengan APS Terendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12 Tahun	2014	Banda Aceh, Sabang, Aceh Barat (100,00%)	Bener Meriah (99,11%)	Bener Meriah, Gayo Lues, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya
	2015	Subulussalam, Lhokseumawe, Langsa (100,00%)	Nagan Raya (98,48%)	Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Tamiang
	2016	Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe (100,00%)	Subulussalam (98,84%)	Subulussalam, Nagan Raya, Gayo Lues, Pidie, Aceh Selatan
13-15 Tahun	2014	Sabang, Simeulue, Aceh Singkil (100,00%)	Bener Meriah (93,32%)	Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya

	2015	Sabang, Aceh Besar (100,00%)	Aceh Singkil (89,91%)	Aceh Singkil, Aceh Timur, Lhokseumawe. Aceh Tamiang, Nagan Raya
	2016	Banda Aceh, Aceh Barat (100,00%)	Aceh Besar (94,04%)	Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Simeulue
16-18 Tahun	2014	Simeulue (98,53%)	Aceh Timur (69,61%)	Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Banda Aceh
	2015	Aceh Tengah (91,64%)	Aceh Barat (74,44%)	Aceh Barat, Aceh Utara, Pidie, Aceh Tamiang, Bireuen
	2016	Banda Aceh (59,45%)	Gayo Lues (20,38%)	Gayo Lues, Sabang, Bener Meriah, Aceh Singkil, Aceh Besar

Sumber: Badan Pusat Statistik

Disparitas capaian APS yang terjadi pada level kabupaten/kota memiliki persentase yang beragam dari tahun ke tahun menurut kelompok umur. Pada tahun 2016, Kota Banda Aceh dan Subulussalam mencatat angka APS tertinggi dan terendah untuk kelompok umur 7-12 tahun, dengan disparitas sebesar 1,16 persen. Sementara untuk usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun), Kota Banda Aceh juga memiliki APS tertinggi di tahun 2016, yaitu 100 persen. Capaian ini berselisih sebesar 5,96 persen dari APS terendah yaitu APS Kabupaten Aceh Besar yang sebesar 94,04 persen. Lebih lanjut, untuk APS 16-18 tahun, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah dengan capaian APS tertinggi dan terendah di tahun 2016. Disparitas kedua kabupaten ini cukup besar yaitu 39,07 persen.

Salah satu hambatan peningkatan kapasitas dasar penduduk adalah tingginya biaya pendidikan. Ketidakmampuan untuk membiayai sekolah akan berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. Menyikapi hal ini, pemerintah telah membebaskan biaya pendidikan serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi. Namun, sepertinya manfaat dari program tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat, sehingga angka putus sekolah cukup tinggi pada kelompok umur 16-18 tahun di Provinsi Aceh.

3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

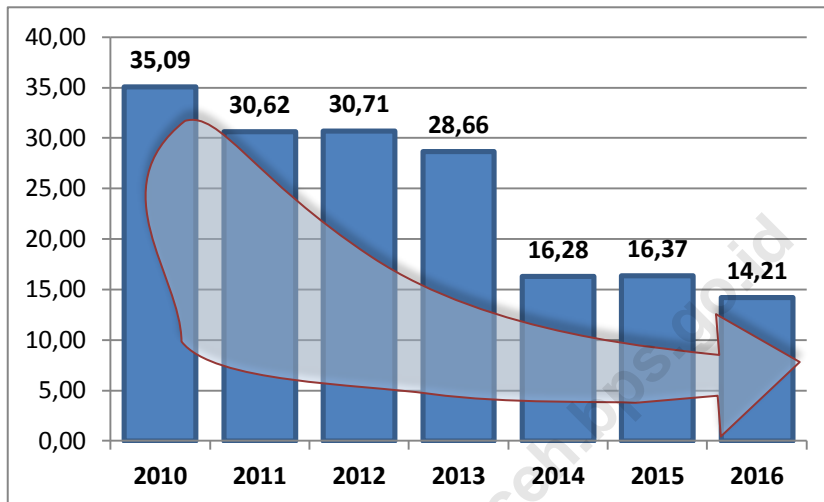
Salah satu upaya dalam peningkatan mutu sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas hidup manusia dari segi kesehatan. Selain pendidikan, derajat kesehatan menjadi salah satu pilar penentu kualitas hidup manusia. Sehingga pemerintah diharapkan memiliki tingkat kepedulian tinggi, serta peran dari seluruh

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia

masyarakat untuk mendukung dan menjaga berbagai fasilitas kesehatan agar peningkatan derajat kesehatan dapat tercapai.

Gambar 3.2

Angka Kesakitan Penduduk Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

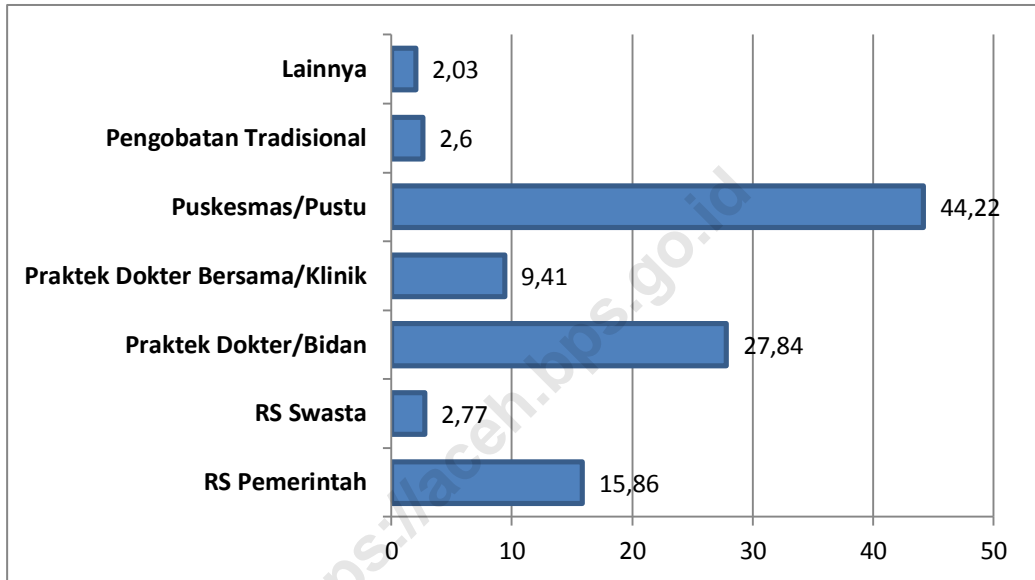
Dengan tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan, diharapkan status kesehatan yang optimal dapat menjadikan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur status kesehatan adalah angka morbiditas (angka kesakitan). Penduduk yang mengalami morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data Susenas tahun 2016, angka morbiditas (angka kesakitan) penduduk Aceh adalah sebesar 14,21 persen. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2015 yang mencapai 16,37 persen.

Dalam mengobati keluhan penyakit, masyarakat Aceh umumnya lebih memilih berobat jalan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas/pustu. Pada tahun 2016, persentase penduduk Aceh yang memanfaatkan fasilitas ini adalah sebanyak 44,22 persen. Persebaran puskesmas/pustu di hampir semua kecamatan di Aceh semakin dirasa manfaatnya oleh masyarakat, sehingga mempermudah akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Sementara persentase jumlah penduduk yang berobat jalan

di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta masing-masing hanya sebesar 15,86 persen dan 2,77 persen.

Gambar 3.3

Persentase Penduduk Aceh Menurut Tempat/Cara Berobat Jalan, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor-faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan kependudukan/keturunan. Berdasarkan konsep derajat kesehatan ini faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan. Tidak hanya itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan.

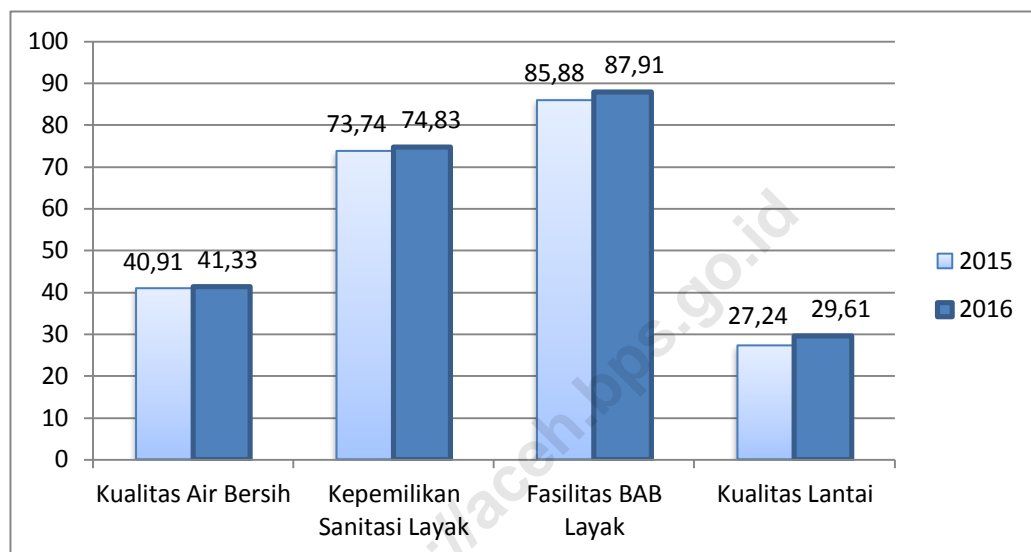
Kondisi fisik rumah dinilai sangat mempengaruhi kesehatan penduduk. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MenKes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa kelompok penilaian rumah sehat meliputi komponen rumah (dinding, lantai, langit-langit, dan ventilasi), komponen sanitasi (air bersih, pembuangan kotoran, limbah, dan sampah) serta

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia

komponen perilaku penghuni rumah (membuka jendela, membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya).

Gambar 3.4

Beberapa Indikator Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, 2015-2016

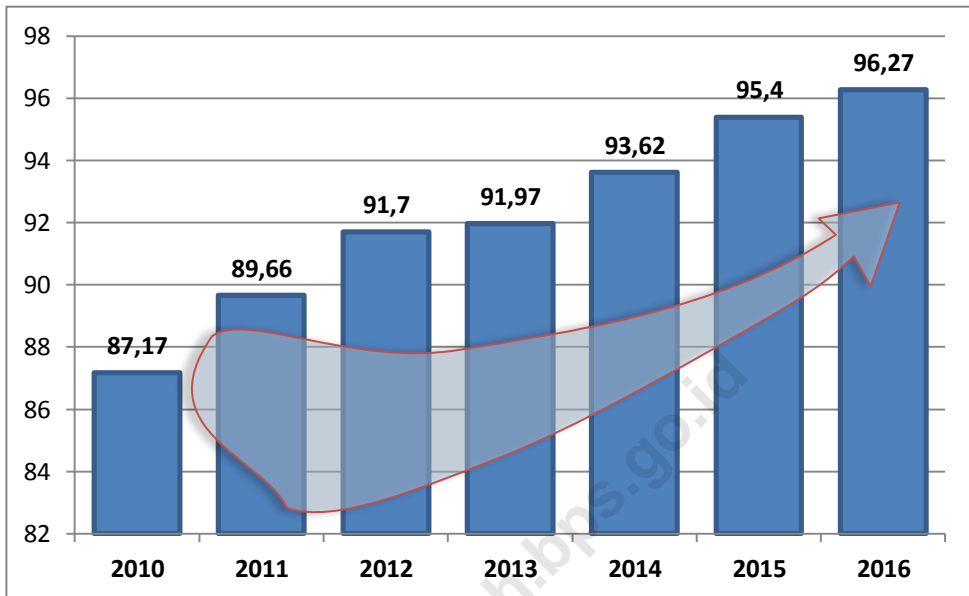


Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi rumah tangga di Aceh, seperti pada Gambar 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 74,83 persen rumah tangga yang sudah memiliki fasilitas buang air besar yang layak (milik sendiri dan bersama). Kondisi ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, jumlah rumah tangga dengan fasilitas BAB layak (kloset leher angsa dan tangki septik) juga meningkat dari 85,88 persen pada tahun 2015 menjadi 87,91 persen pada tahun 2016. Di sisi lain, sekitar 40-41 persen penduduk Aceh yang mengkonsumsi air bersih berupa air mineral (bermerek dan isi ulang) dan air ledeng (meteran dan eceran). Selanjutnya, nilai indikator kualitas lantai terluas rumah, tercatat sebanyak 29,61 persen rumah tangga di Aceh dengan luas lantai lebih kecil dari 10 meter persegi per kapita pada tahun 2016. Semakin kecil angka indikator ini maka semakin membaik kondisi rumah yang ditempati oleh penduduk.

Gambar 3.5

Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis di Provinsi Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator lainnya yang juga sebagai faktor pendukung upaya peningkatan pembangunan manusia melalui aspek kesehatan adalah pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Ini adalah pelayanan kesehatan yang pertama kali bagi manusia sejak lahir ke dunia yaitu berawal dari proses persalinan. Tersedianya pelayanan kesehatan untuk persalinan dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya) adalah faktor penting untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Praktek persalinan yang aman sudah barang tentu menjadi incaran rumah tangga untuk menurunkan resiko-resiko medis hingga menekan angka kematian karena proses kelahiran.

Di Provinsi Aceh terhitung persentase persalinan yang dibantu tenaga medis pada tahun 2016 mencapai 96,27 persen. Angka capaian ini tentu saja menggembirakan karena hanya kurang dari 5 persen penduduk di Aceh yang proses kelahiran bayinya tidak ditolong oleh tenaga medis. Gambar 3.5 menampilkan tren peningkatan persentase indikator ini sejak tahun 2010 hingga 2016.

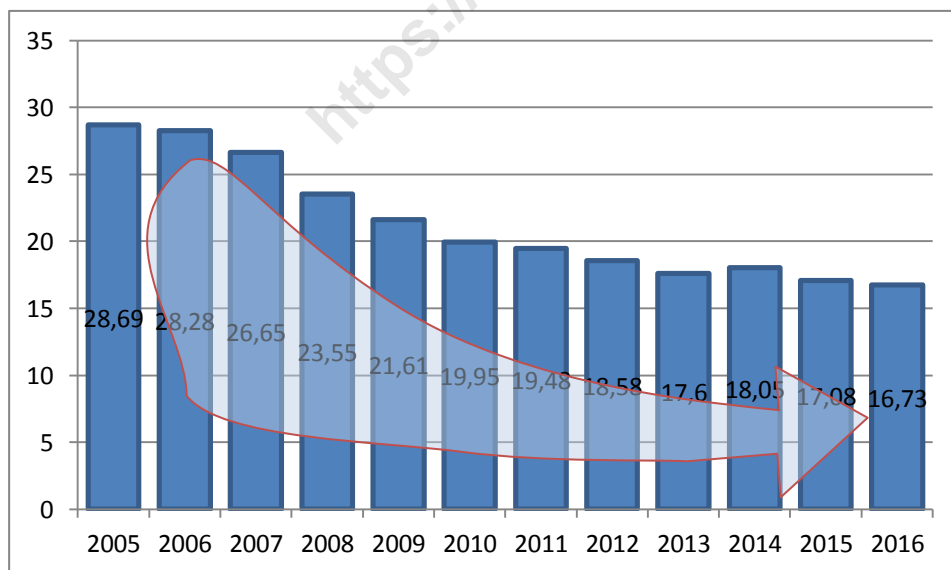
3.3 Capaian dan Tantangan di Bidang Ekonomi

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu penanganan kemiskinan. Sebagai salah satu masalah pokok dalam pembangunan yang sifatnya multiaspek sehingga Kemiskinan merupakan tantangan yang penanganannya juga perlu mendapat perhatian khusus. Kemiskinan dapat mengakibatkan individu masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan potensi dirinya, seperti contohnya dalam hal mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan faktor esensial dalam pembangunan manusia.

Meskipun tingkat kemiskinan tidak signifikan hubungannya dengan angka indeks pembangunan manusia, namun mencermati tingkat kemiskinan penduduk merupakan bagian dari tantangan pembangunan bidang sosial-ekonomi. Kecenderungan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan arah penurunan persentase namun juga disertai dengan fluktuasi naik-turun pada tahun 2012-2016.

Gambar 3.6

Tren Kemiskinan Provinsi Aceh, 2005-2016



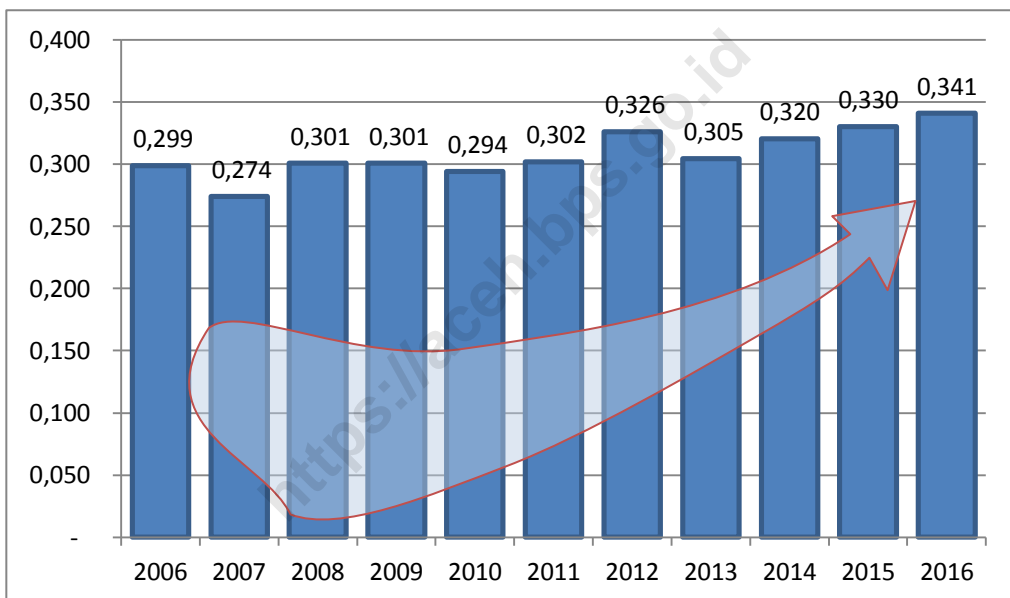
Sumber: Badan Pusat Statistik

Membahas lebih detail tentang kemiskinan, terdapat suatu indikator yang menjelaskan ukuran pemerataan pendapatan terhadap suatu wilayah. Indikator ini

adalah Gini Rasio yang menggambarkan besar kecilnya ketipangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi angka Gini Rasio, semakin lebar pula terjadi ketimpangan pendapatan antar penduduknya. Di Provinsi Aceh, angka indikator ini masih fluktuatif. Setelah sempat mencapai titik gini rasio yang rendah pada tahun 2007 (0,274), gini rasio Aceh pada tahun 2016 kini kembali meningkat mencapai angka 0,341. Hal ini artinya terjadi pelebaran jarak antara pendapatan penduduk pada tahun 2016.

Gambar 3.7

Tren Gini Rasio Provinsi Aceh, 2006-2016

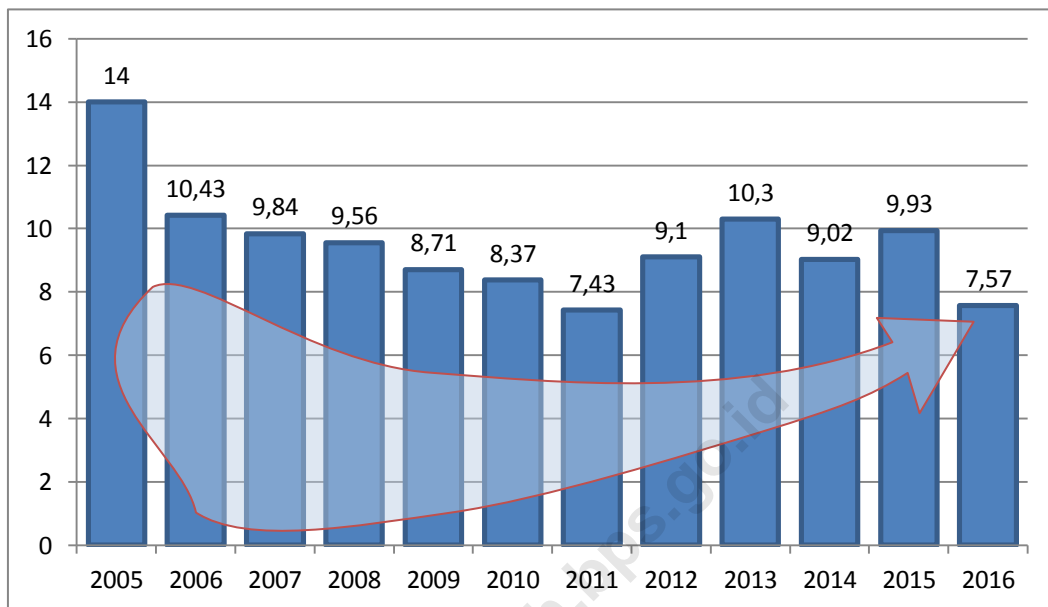


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain masalah kemiskinan, tantangan berikutnya dalam hal pembangunan ekonomi Aceh adalah masalah ketersediaan lapangan kerja versus jumlah tenaga kerja yang tersedia. Keterkaitan antara kemiskinan dan pengangguran dapat dikatakan cukup dekat karena memberi dampak luas dan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan angka kemiskinan, persentase pengangguran di Provinsi Aceh juga menunjukkan pergerakan yang belum stabil menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor musiman yang terjadi di perdesaan yaitu tenaga kerja di sektor pertanian.

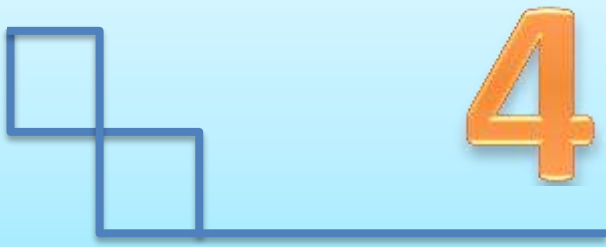
Gambar 3.8

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh, 2005-2016



Sumber. Badan Pusat Statistik

Selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 sempat terjadi tren penurunan angka pengangguran di Aceh, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh juga sempat berada di bawah level 9 persen yaitu pada periode 2009 sampai dengan 2011. Namun kemudian, tingkat pengangguran Aceh kembali mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2012-2016. Bahkan pada tahun 2013, TPT Aceh kembali menembus level di atas 10 persen. Pada tahun 2016 sendiri, TPT Aceh menurun dibandingkan tahun 2015 menjadi 7,57 persen.



DISPARITAS **P**ENCAPAIAN **P**EMBANGUNAN **M**ANUSIA

Tantangan yang masih harus dihadapi pemerintah adalah adanya kesenjangan capaian pembangunan manusia antar-kabupaten/kota. Perhatian khusus perlu diberikan untuk kabupaten/kota dengan capaian IPM terendah seperti Gayo Lues, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Simeulue.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.dps.go.id>

DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH

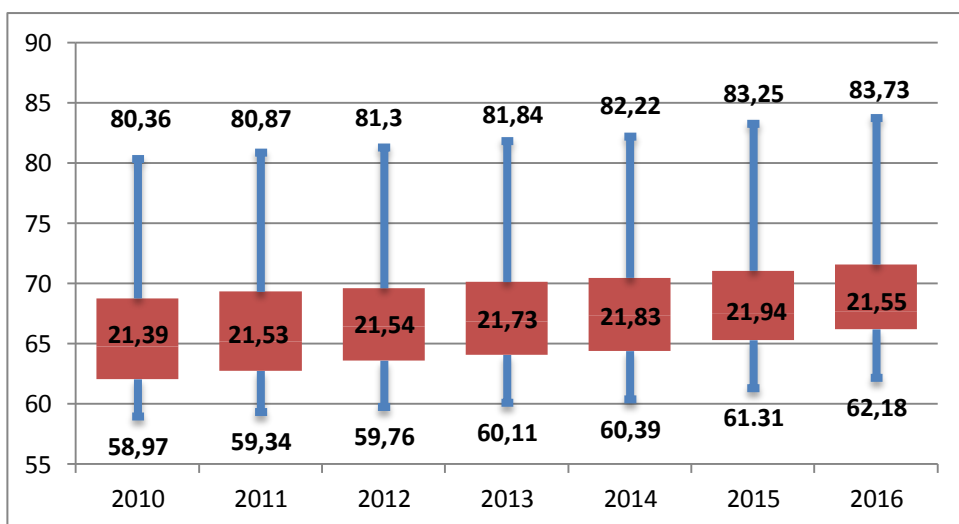
4.1 Disparitas IPM Antarkabupaten di Provinsi Aceh

Ketidakmerataan perkembangan maupun penyebaran program pembangunan tentunya berakibat pada ketimpangan yang terjadi di daerah. Kesenjangan ini merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga terdapat perbedaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Seperti telah dibahas bahwa perkembangan IPM Aceh dari tahun 2010-2016 terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan pembangunan manusia Aceh secara umum ini juga menggambarkan terjadinya kesenjangan antarkabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena kabupaten/kota mempunyai kecepatan capaian komponen yang berbeda.

Disparitas pembangunan manusia di Aceh secara nyata menunjukkan terjadinya pelebaran kesenjangan antardaerah. Pada tahun 2016, disparitas antar IPM tertinggi yang dicapai oleh Kota Banda Aceh sebesar 80,36 persen dengan IPM terendah yang terjadi di Kota Subulussalam sebesar 58,97 persen, mencapai 21,39 poin. Nilai ini terus melebar/meningkat dari disparitas yang terjadi di tahun 2010 (21,39 poin) sampai dengan tahun 2016 (21,55 poin).

Gambar 4.1

Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016



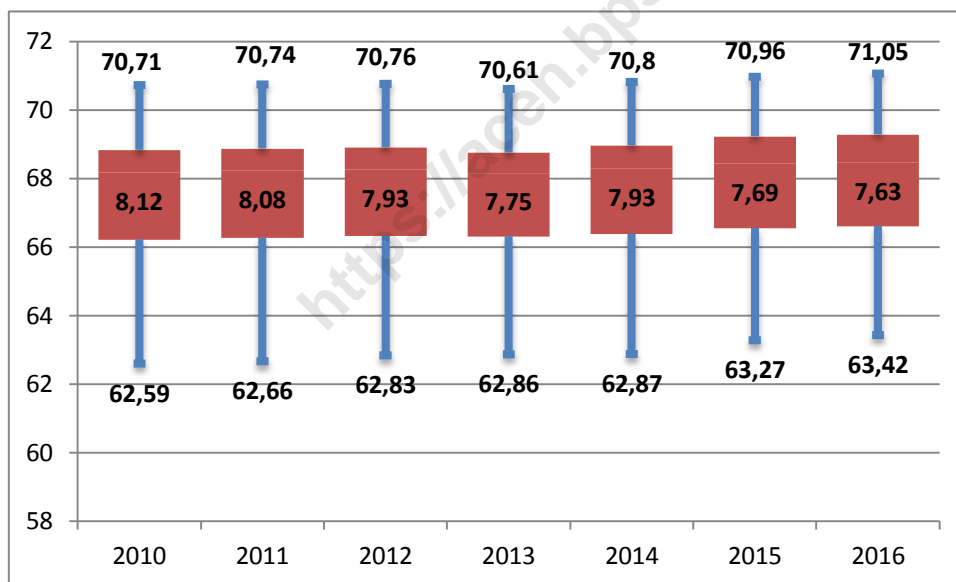
Sumber. Badan Pusat Statistik

Kesimpulan

Dinamika perubahan disparitas nilai IPM tentunya merupakan agregat dari naik-turunnya disparitas komponen pembentuk IPM. Untuk komponen hidup sehat, Angka Harapan Hidup masing-masing daerah telah memotret bagaimana perbedaan tinggi-rendahnya komponen ini. Tren perbedaan AHH setiap tahunnya memperlihatkan adanya penurunan disparitas. Tahun 2010, AHH tertinggi dicapai oleh Kota Banda Aceh (70,71 tahun) yang berbeda sebanyak 8,12 poin dari AHH terendah yang dicapai oleh Kota Subulussalam (62,59 tahun). Pergeseran waktu yang disertai dengan adanya perbaikan atau penambahan fasilitas penunjang kebutuhan hidup sehat mengakibatkan disparitas AHH semakin menyempit. Masih perbandingan antara dua daerah yang sama (Kota Banda Aceh dan Subulussalam), disparitas AHH tahun 2016 menjadi sebesar 7,63 poin.

Gambar 4.2

Disparitas Angka Harapan Hidup Antar Kabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016



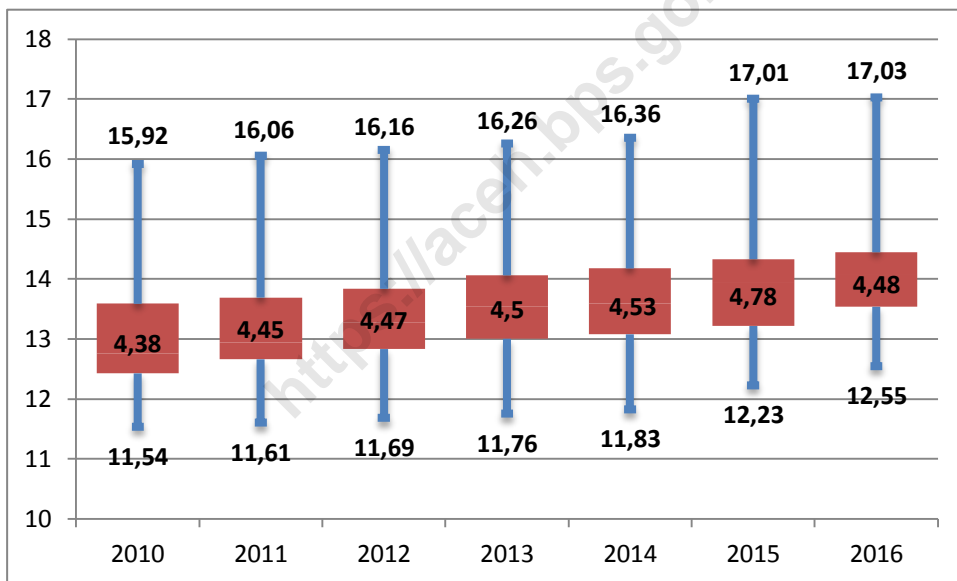
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya dikaji bagaimana perbedaan antar daerah di Aceh pada aspek pendidikan. Pada penghitungan IPM metode baru, komponen Harapan Lama Sekolah telah dihitung sesuai dengan pendekatan dari data hasil Susenas. Tapi kabupaten/kota dengan program pembangunannya masing-masing akan memperlihatkan hasil realisasi kerja pemerintahannya melalui indikator-indikator yang terukur pada aspek-aspek pembangunannya.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang masuk dalam skala prioritas program pembangunan daerah. Namun, dari segi kualitas pembangunan manusia pada aspek ini, kesenjangan antara daerah yang sudah lebih baik komponen pendidikannya dibandingkan dengan daerah yang belum berkembang menjadi semakin melebar. Seperti terlihat pada Gambar 4.3, disparitas HLS antar kabupaten/kota di Aceh semakin besar dari tahun ke tahun. Tahun 2016, jarak antara HLS tertinggi (Kota Banda Aceh: 17,03 tahun) dengan HLS terendah (Kabupaten Aceh Timur: 12,55 tahun) adalah sebesar 4,48 poin. Angka tersebut naik 0,10 poin dibandingkan dengan disparitas HLS tahun 2010.

Gambar 4.3

Disparitas Harapan Lama Sekolah Antar Kabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

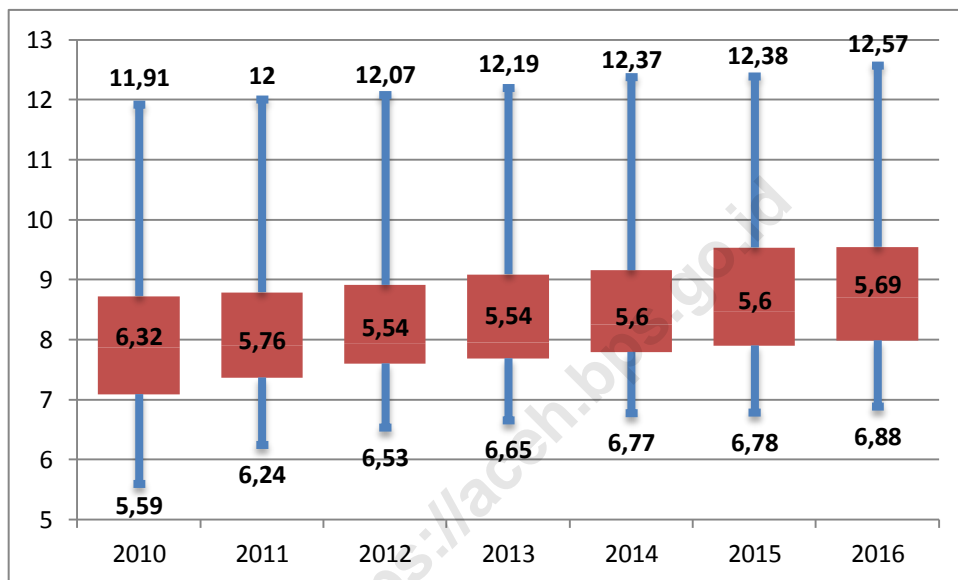
Selanjutnya adalah disparitas komponen rata-rata lama sekolah yang disajikan dalam Gambar 4.4. Berbeda dengan komponen HLS yang disparitasnya semakin melebar setiap tahunnya, komponen RLS justru menyatakan bahwa perbedaan antar kabupaten/kota cenderung semakin mengecil. Pada tahun 2010, disparitas rata-rata lama sekolah antara daerah yang tertinggi RLS-nya (Banda Aceh: 11,91 tahun) dibandingkan dengan daerah yang paling rendah RLS-nya (Gayo Lues: 5,59 tahun) adalah sebesar 6,32 tahun. Artinya, pada tahun tersebut, ketika penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Banda Aceh bersekolah hingga hampir menyelesaikan jenjang SLTA, penduduk di Kabupaten Gayo Lues justru hanya menikmati bangku sekolah

Kesimpulan

samai dengan kelas 6 sekolah dasar. Pada tahun 2016, disparitas RLS menurun hingga menjadi sebesar 5,69 poin, yaitu perbedaan antara RLS di Kota Banda Aceh (12,57 tahun) dengan RLS di Kota Subulussalam (6,88 tahun).

Gambar 4.4

Disparitas Rata-Rata Lama Sekolah Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

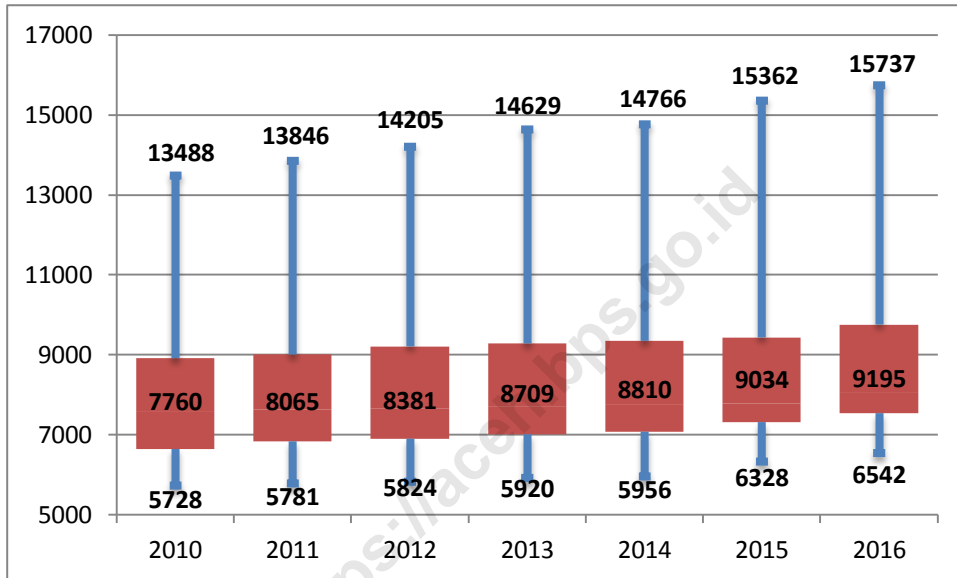
Beralih ke komponen IPM selanjutnya, ketimpangan pembangunan manusia pada komponen standar hidup layak dapat ditinjau dari besarnya perbedaan antardaerah pada indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPD). Keberagaman perkembangan atau pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota memunculkan kondisi perekonomian yang mempunyai tingkatan yang tidak sama.

Disparitas PPD penduduk di Aceh pada tahun 2010 adalah sebesar 7,76 juta rupiah. Ini adalah rentang perbedaan antardaerah yang memiliki PPD tertinggi yaitu Kota Banda Aceh (13,488 juta rupiah) dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Timur yang mencapai PPD terendah (5,727 juta rupiah). Sama halnya dengan beberapa komponen IPM lainnya (AHH dan HLS) yang mengalami pelebaran rentang/disparitas dari tahun ke tahun, pada dimensi standar hidup juga menunjukkan rentang yang semakin melebar dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Bahkan capaian disparitas PPD

pada tahun 2016 mencapai 9,195 juta rupiah, yaitu perbedaan antara PPD Kota Banda Aceh dan PPD Kabupaten Simeulue.

Gambar 4.5

Disparitas Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016

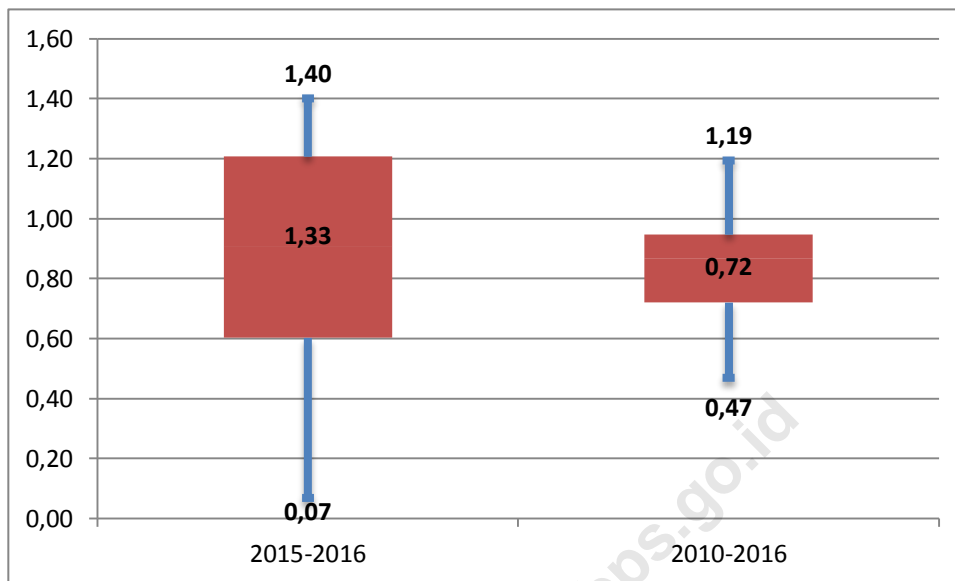


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembahasan disparitas IPM tidak hanya dapat ditilik dari kesenjangan pada aspek-aspek pembentuk IPM saja. Akan tetapi, kesenjangan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari perbedaan laju pertumbuhan IPM masing-masing kabupaten/kota. Ilustrasi perbedaan variasi pertumbuhan IPM antar kabupaten disajikan pada Gambar 4.6, yang menggambarkan pertumbuhan pembangunan manusia pada periode tahun 2010-2016 dan tahun 2015-2016.

Gambar 4.6

Disparitas Pertumbuhan IPM Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Terlihat bahwa disparitas pertumbuhan IPM di Aceh pada periode tahun 2015-2016 (1,33 poin) lebih lebar dari disparitas pertumbuhan IPM pada periode tahun 2010-2016 (0,72 poin). Artinya adalah pertumbuhan IPM tahun 2016 terhadap IPM 2015 lebih bervariasi antar kabupaten/kota dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2010-2016. Semakin sempit perbedaan/disparitas pertumbuhan IPM maka semakin merata kecepatan pembangunan manusia menuju ideal antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2015.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2016. Indikator Pendidikan Provinsi Aceh 2016. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2016. Aceh Dalam Angka 2016. Banda Aceh.
- H. Preston, Samuel, et. all. 2004. Demography: Measuring and Modelling Population Processes. USA: Blackwell.
- Meneg PP dan BPS. 2008. Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007. Jakarta.
- UNDP, BPS, dan Bappeda Aceh. 2010. Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010: Pembangunan Manusia dan Peberdayaan Masyarakat. Jakarta.
- United Nations Development Programme. 1993. Human Development Report. New York: UNDP.
- . 2014. Human Development Report. New York: UNDP.
- . 2015. Human Development Report. New York: UNDP.
- . 2016 .Human Development Report. New York: UNDP.
- <http://id.wikipedia.org>

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



<https://aceh.bps.go.id>

Lampiran



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

Lampiran 1. Angka Harapan Hidup Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	69,08	69,15	69,23	69,31	69,35	69,50	69,51
01. Simeulue	64,05	64,15	64,22	64,23	64,24	64,66	64,78
02. Aceh Singkil	66,71	66,76	66,85	66,91	66,94	66,97	67,02
03. Aceh Selatan	62,92	63,03	63,12	63,16	63,18	63,61	63,75
04. Aceh Tenggara	66,85	66,93	66,96	67,03	67,07	67,40	67,51
05. Aceh Timur	67,92	67,97	68,02	68,05	68,06	68,20	68,26
06. Aceh Tengah	68,22	68,27	68,30	68,35	68,38	68,44	68,48
07. Aceh Barat	67,16	67,21	67,25	67,30	67,33	67,49	67,56
08. Aceh Besar	69,34	69,38	69,41	69,44	69,46	69,47	69,49
09. Pidie	66,14	66,20	66,25	66,27	66,28	66,46	66,52
10. Bireuen	70,27	70,30	70,32	70,34	70,35	70,64	70,72
11. Aceh Utara	68,32	68,36	68,40	68,41	68,42	68,48	68,51
12. Aceh Barat Daya	63,44	63,55	63,63	63,69	63,72	64,20	64,35
13. Gayo Lues	64,24	64,31	64,38	64,42	64,44	64,77	64,88
14. Aceh Tamiang	68,57	68,61	68,65	68,66	68,67	68,99	69,08
15. Nagan Raya	68,17	68,24	68,26	68,28	68,29	68,59	68,67
16. Aceh Jaya	66,29	66,35	66,39	66,45	66,48	66,63	66,70
17. Bener Meriah	68,51	68,56	68,58	68,62	68,64	68,79	68,85
18. Pidie Jaya	69,01	69,05	69,07	69,11	69,13	69,49	69,59
71. Banda Aceh	70,71	70,74	70,76	70,79	70,80	70,89	70,92
72. Sabang	69,52	69,54	69,54	69,54	69,54	69,93	70,01
73. Langsa	68,65	68,70	68,75	68,78	68,79	68,94	69,00
74. Lhokseumawe	70,53	70,57	70,59	70,61	70,62	70,96	71,05
75. Subulussalam	62,59	62,66	62,83	62,86	62,87	63,27	63,42

Lampiran 2. Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12,90	13,03	13,19	13,36	13,53	13,73	13,89
01. Simeulue	12,45	12,66	12,67	12,67	12,75	12,83	13,07
02. Aceh Singkil	12,41	12,84	13,49	13,85	14,05	14,26	14,27
03. Aceh Selatan	12,35	12,51	12,57	13,01	13,05	13,24	13,53
04. Aceh Tenggara	12,43	12,66	13,18	13,54	13,59	13,62	13,96
05. Aceh Timur	11,54	11,61	11,69	11,76	11,83	12,23	12,55
06. Aceh Tengah	12,76	13,49	13,55	13,76	14,11	14,21	14,23
07. Aceh Barat	14,02	14,27	14,29	14,32	14,35	14,55	14,56
08. Aceh Besar	13,90	13,91	13,91	14,21	14,35	14,47	14,48
09. Pidie	12,97	13,07	13,21	13,36	13,50	13,61	13,93
10. Bireuen	13,66	13,83	14,03	14,22	14,25	14,41	14,42
11. Aceh Utara	13,62	13,69	13,77	13,89	13,99	14,10	14,11
12. Aceh Barat Daya	12,90	12,94	12,98	13,02	13,11	13,20	13,54
13. Gayo Lues	12,66	12,77	12,89	13,01	13,03	13,13	13,27
14. Aceh Tamiang	12,23	12,34	12,57	12,79	13,27	13,54	13,55
15. Nagan Raya	13,12	13,20	13,27	13,34	13,42	14,04	14,09
16. Aceh Jaya	12,44	12,51	13,30	13,69	13,81	13,93	13,94
17. Bener Meriah	12,49	12,69	12,78	12,93	13,02	13,04	13,42
18. Pidie Jaya	13,56	13,70	13,76	13,92	14,03	14,14	14,51
71. Banda Aceh	15,92	16,06	16,16	16,26	16,36	17,01	17,03
72. Sabang	11,76	11,91	12,07	12,23	12,39	12,98	13,17
73. Langsa	13,56	13,61	13,93	14,25	14,58	15,16	15,17
74. Lhokseumawe	13,89	14,23	14,91	14,92	15,11	15,14	15,16
75. Subulussalam	12,76	12,89	13,03	13,16	13,30	13,73	14,18

**Lampiran 3. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota,
2010-2016**

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	8,28	8,32	8,36	8,44	8,71	8,77	8,86
01. Simeulue	8,17	8,26	8,34	8,55	8,89	8,90	8,91
02. Aceh Singkil	6,65	6,86	7,16	7,33	7,48	7,50	7,69
03. Aceh Selatan	7,50	7,53	7,56	7,59	7,60	7,79	8,02
04. Aceh Tenggara	8,38	8,45	8,57	8,58	8,77	9,32	9,33
05. Aceh Timur	7,04	7,09	7,13	7,28	7,38	7,40	7,60
06. Aceh Tengah	9,07	9,13	9,19	9,25	9,31	9,65	9,66
07. Aceh Barat	7,64	7,71	7,77	7,83	8,17	8,47	8,70
08. Aceh Besar	9,43	9,44	9,45	9,46	9,61	9,91	9,92
09. Pidie	7,94	7,96	8,08	8,15	8,25	8,74	8,75
10. Bireuen	8,34	8,45	8,50	8,58	8,85	9,14	9,15
11. Aceh Utara	7,05	7,39	7,69	7,83	8,06	8,07	8,09
12. Aceh Barat Daya	6,90	7,49	7,53	7,69	7,89	7,90	7,93
13. Gayo Lues	5,59	6,24	6,88	7,00	7,04	7,06	7,10
14. Aceh Tamiang	7,61	7,64	7,66	7,69	7,71	7,95	8,21
15. Nagan Raya	7,12	7,32	7,73	7,78	7,93	8,22	8,24
16. Aceh Jaya	7,17	7,34	7,64	7,70	7,88	7,89	7,95
17. Bener Meriah	7,89	8,22	8,63	8,93	9,00	9,42	9,43
18. Pidie Jaya	7,87	7,90	7,93	7,95	8,30	8,45	8,46
71. Banda Aceh	11,91	12,00	12,07	12,19	12,37	12,38	12,57
72. Sabang	10,08	10,12	10,16	10,21	10,35	10,37	10,51
73. Langsa	10,33	10,38	10,43	10,47	10,48	10,49	10,71
74. Lhokseumawe	10,00	10,08	10,16	10,37	10,39	10,41	10,53
75. Subulussalam	6,30	6,41	6,53	6,65	6,77	6,78	6,88

Lampiran 4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7934	8044	8134	8289	8297	8533	8768
01. Simeulue	5728	5781	5824	5920	5956	6328	6542
02. Aceh Singkil	7081	7123	7165	7208	7221	7602	8068
03. Aceh Selatan	6855	6890	6913	6989	7003	7224	7397
04. Aceh Tenggara	6663	6731	6788	6899	6949	7001	7212
05. Aceh Timur	6614	6897	7178	7219	7288	7623	7825
06. Aceh Tengah	9295	9330	9365	9400	9435	9473	9920
07. Aceh Barat	7576	7632	7688	7744	7771	8135	8559
08. Aceh Besar	8138	8246	8344	8497	8622	8775	8788
09. Pidie	9032	9076	9121	9167	9182	9233	9273
10. Bireuen	6644	6822	6996	7232	7319	7622	7885
11. Aceh Utara	6361	6465	6562	6714	6838	7327	7520
12. Aceh Barat Daya	6608	6655	6828	6966	7059	7303	7567
13. Gayo Lues	7611	7635	7646	7709	7742	7780	8048
14. Aceh Tamiang	7420	7455	7478	7554	7569	7750	7766
15. Nagan Raya	6629	6834	6902	7019	7084	7141	7460
16. Aceh Jaya	8514	8596	8679	8691	8721	8749	8796
17. Bener Meriah	9000	9289	9580	9645	9721	9760	10140
18. Pidie Jaya	8833	8935	9027	9173	9260	9398	9590
71. Banda Aceh	13488	13846	14205	14629	14766	15362	15737
72. Sabang	9047	9254	9692	9718	9823	10041	10507
73. Langsa	9496	9713	9925	10198	10284	10605	11015
74. Lhokseumawe	8597	8900	9303	9580	9678	10093	10549
75. Subulussalam	6185	6230	6275	6320	6326	6504	6669

Lampiran 5. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,54	0,53	0,72	0,75	0,93	0,79	0,71
01. Simeulue	0,71	0,36	0,70	0,81	1,58	1,04	0,87
02. Aceh Singkil	1,23	1,74	1,00	0,62	1,20	1,38	1,19
03. Aceh Selatan	0,49	0,28	0,94	0,13	1,49	1,34	0,78
04. Aceh Tenggara	0,71	1,12	0,86	0,53	1,32	1,06	0,93
05. Aceh Timur	0,97	0,93	0,54	0,47	1,54	1,35	0,97
06. Aceh Tengah	1,20	0,26	0,47	0,64	0,78	0,74	0,68
07. Aceh Barat	0,64	0,29	0,30	0,67	1,63	1,24	0,80
08. Aceh Besar	0,26	0,23	0,73	0,64	0,90	0,07	0,47
09. Pidie	0,30	0,52	0,43	0,41	1,19	0,55	0,57
10. Bireuen	0,92	0,81	0,98	0,70	1,54	0,63	0,93
11. Aceh Utara	1,04	0,93	0,83	0,87	1,40	0,51	0,93
12. Aceh Barat Daya	1,38	0,65	0,76	0,73	1,09	1,25	0,98
13. Gayo Lues	1,61	1,52	0,59	0,19	0,52	0,93	0,89
14. Aceh Tamiang	0,34	0,49	0,54	0,81	1,42	0,57	0,69
15. Nagan Raya	1,05	1,04	0,49	0,54	1,75	0,88	0,96
16. Aceh Jaya	0,65	1,92	0,75	0,57	0,34	0,25	0,75
17. Bener Meriah	1,41	1,32	0,87	0,37	0,89	1,13	1,00
18. Pidie Jaya	0,45	0,31	0,52	0,91	0,86	0,91	0,66
71. Banda Aceh	0,63	0,53	0,66	0,46	1,25	0,58	0,69
72. Sabang	0,65	0,98	0,32	0,61	1,41	1,17	0,86
73. Langsa	0,50	0,83	0,89	0,56	1,26	0,90	0,82
74. Lhokseumawe	1,12	1,66	0,79	0,42	0,90	0,89	0,96
75. Subulussalam	0,63	0,71	0,59	0,47	1,54	1,40	0,89



DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jl. TGK H.M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121
Tlp (0651) 23005) Faks (0651) 33632
<http://aceh.bps.go.id> email: bps1100@bps.go.id